

Upah buruh dan ketergantungan hidup dengan pabrik atau sistem perkebunan menciptakan strategi-strategi bertahan hidup para buruh perkebunan. Para buruh yang tinggal di wilayah perkebunan tentu saja tidak memiliki areal sawah atau ladang untuk aktivitas ekonomi pertanian mereka. Para buruh tersebut murni mengandalkan pendapatannya dari upah.

ISSN 1907-5979



working papers

LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Volume 2 Nomor 1 Mei 2007
ISSN: 1907-5979

BUDAYA KEBUN DAN EKONOMI PERKEBUNAN (SEJARAH ETNOGRAFI DESA PERKEBUNAN DI JAWA)

Bambang K. Prihandono

Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta 55281 Indonesia.
Kotak Pos 1086. Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748
Website: <http://www.uajy.ac.id> E-mail: fisip@mail.uajy.ac.id

Tentang Laboratorium Sosiologi

Volume 2 Nomor 1 Mei 2007
ISSN: 1907-5979

working
papers
LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Laboratorium Sosiologi, Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta didirikan pada tahun 1998. Letupan gagasan yang mendasarinya adalah keinginan untuk menerapkan teori dalam wujud kerja-kerja praktikum penelitian.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan aktivitas, Laboratorium Sosiologi pun semakin menemukan posisi institusional dan fokus kegiatan. Secara institusional, Laboratorium Sosiologi adalah organisasi di bawah program studi yang berfungsi sebagai sistem pendukung bagi kegiatan "tri dharma" program studi Sosiologi, yaitu proses belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian. Penerjemahan dari ketiga fungsi tersebut adalah kerja-kerja seperti pengumpulan data, praktikum penelitian, pembuatan film dokumenter, diskusi bulanan, seminar dan penerbitan. Secara khusus, sebagai bentuk penguatan dan pendalaman akan aktivitas pengabdian, Laboratorium Sosiologi selalu mengedepankan kerja jejaring.

Dengan demikian, tak berlebihan kiranya jika keberadaan Laboratorium Sosiologi menjadi ujung tombak pengembangan sosiologi, baik ilmu maupun institusinya.

Ketua:

Bambang K. Prihandono

Dewan Redaksi:

Andreas A. Susanto

E. Yuningtyas

Suryo Adi Pramono

V. Lucinda

V. Sundari Handoko

Y. Kunharibowo

St. Nindito

Desain wajah dan isi:

Dodo Hartoko

Jl. Babarsari No.6 Yogyakarta 55281 Indonesia.

Kotak Pos 1086. Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748

Website: <http://www.uajy.ac.id> E-mail: kalab_sos@mail.uajy.ac.id

Budaya Kebun dan Ekonomi Perkebunan (Sejarah Etnografi Desa Perkebunan di Jawa)

Abstract

Colonialism is a significant factor in establishing the plantation system in Indonesia as a new socio-economic system. The political economy of the colonial agriculture introduced a new system in local areas, changing the economic system from rural subsistence to export oriented agriculture. In the case of the Kendeng Lembu area, particularly at the postcolonial times, fluctuations in the development of plantation have been related to the project of de-colonization in political and economic areas. Despite that the processes of decolonization, social system and structure in the Kendeng Lembu's plantation seem to be a mimicry of the colonial plantation system heritage.

I. Latar Belakang Masalah.

Perkebunan sebagai sebuah sistem sosial, yang memiliki asal-usul dari kolonisasi Eropa, adalah satu dari kontrol produksi Eropa yang merupakan salah satu dari instrumen ekonomi, sosial dan politik untuk meraih keuntungan dari kawasan tropis dengan orientasi tanaman import-eksport. Sebuah masyarakat perkebunan, dalam banyak kasus, merupakan bagian dari sebuah sistem luas yang ditandai oleh apparatus pemerintah,

kelas pengusaha kapitalis, dan suatu orientasi produksi komersial untuk pasar nasional dan internasional. Maka, perubahan sosial di tingkat lokal adalah produk dari sejarah apropriasi, resistensi dan akomodasi (Marcus and Fischer 1986: 78-81). Dengan kata lain, Stewards (in Wolf 1982: 14) mendefinisikan konsep level sosio-kultural integrasi yang mengacu pada proses struktural antara struktur lokal dan nasional-internasional.

Berbeda dengan penulisan tentang perkebunan yang telah dilakukan oleh para ahli, semisal Stoler (1985; 1986; 1988; 1995) yang memfokuskan pada problem relasi rasial, gender dan protes sosial di sabuk perkebunan Sumatra; Thee Kian Wie (1977) yang memberi perhatian pada sejarah ekonomi di Sumatra Timur; Elson (1984) memberikan perhatian pada dampak besar dari industri gula pada petani Jawa; Knight (1993) menulis tentang perspektif sejarah industri gula; serta Bachriadi (2001) dan Simarmata (2002) yang memfokuskan pada konflik kepemilikan tanah di wilayah perkebunan, penulisan yang berbasis penelitian etnografi ini berupaya untuk melakukan investigasi subjek tentang proses-proses dinamik sosial, kultural dan ekonomi dalam sistem sosial internal dari dunia perkebunan. Argumen dasar dari proyek penelitian ini adalah berlandas pada tesis bahwa proses-proses berkelanjutan tentang dinamika apropriasi, resistensi, dan akomodasi (cf. *a multiple adaptation of the Wolf's term*) tidak hanya terjadi pada relasi antara struktur politik-ekonomi ("*capitalist*") dan pekerja perkebunan, tetapi juga mengambil ruang pada dimensi internal masyarakat perkebunan, seperti konflik-konflik antar pekerja perkebunan (*the indenture and the permanent workers*), laki-laki dan perempuan, generasi pertama dan kedua, manager dan pekerja, negara dan pekerja, dan seterusnya.

Dengan demikian, masalah yang ingin dieksplorasi dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah memahami proses historis dari penciptaan/konstruksi struktur perkebunan, yang dipengaruhi oleh negara dan pasar di Indonesia pada pasca kemerdekaan?
2. Bagaimana memahami proses konstruksi sistem perkebunan dalam kaitannya dengan relasi produksi dan konsumsi di antara pekerja perkebunan?
3. Kemudian, pemahaman dunia perkebunan di Jawa Timur adalah bagaimana menyelidiki pengaruh dari sistem perkebunan pada masyarakat lokal dalam konteks yang lebih luas seperti ekonomi pra-perkebunan, kondisi sosial dan politik, pola-pola penguasaan tanah, karakteristik kultural, dan sebagainya.

Teori dan Metode.

Upaya eksplorasi atas pertanyaan-pertanyaan di atas membawa pemahaman bahwa penulisan etnografi mestilah mempertimbangkan dimensi sejarah yang membangun sistem dan struktur sosial. Wolf (1982: 385) mencatat bahwa untuk mendeskripsikan interkoneksi dari agregasi manusia adalah untuk menggambarkan perkembangan pembangunan dan asal-usul keterkaitan. Penulisan etnografi yang memfokuskan pada *the human agency*, lalu, memiliki garis sama dengan tesis Marx bahwa "*men make their own history but not under conditions of their choosing*" (p.386). Maka, metode penelitian ini akan memberikan perhatian pada konsep kebudayaan sebagai sebuah seri dari proses yang mengkonstruksi dan merekonstruksi, konsep "*trajekte*". Sebuah konsep yang berupaya menangkap keberlanjutan dari interaksi kesadaran individual dan realitas

sosial objektif (Fuchs-Heinritz 2000: 178; Wohlrab-Sahr 2002: 3). Dengan demikian, penelitian pada masyarakat perkebunan di Kendeng Lembu, Banyuwangi ini akan menggunakan metode penelitian biografi (biographical research), yang memiliki fungsi untuk menafsir sejarah dan menjelaskan sejarah (Bourdieu 1990a: 75). Fokus pada topik sejarah komunitas dan pengalaman subjektif, akan digunakan sebagai interview mendalam yang bermanfaat untuk mengkonstruksi sebuah narasi umum tentang masyarakat perkebunan. Penciptaan sebuah jaringan informan adalah juga sebuah kebutuhan fundamental untuk mencapai prinsip objektivitas penelitian. Kunjungan pada informan dan komunitas ketetanggaan yang bertujuan untuk pengembangan pertanyaan dan membuat sebuah komparasi dengan subjek yang lain dan kelompok adalah sebuah metode pengumpulan data (Hefner 1990: 246).

Untuk mengumpulkan material yang relevan, kami akan melakukan "*in-depth interview*" dengan para informan yang meruakan representasi berbagai macam latar belakang seperti generasi pertama dan kedua, pemimpin pekerja, pekerja tetap dan borongan, pekerja perempuan dan laki-laki, serta para manager perkebunan. Dengan demikian, metode penelitian ini memiliki relevansi pada diskusi perspektif mikro-makro (cf. Wolf 1982: 13-19). Akhirnya, kami juga akan mengelaborasi material sejarah dan arsip untuk menganalisis dinamika proses struktural pada konteks politik dan ekonomi. Latar belakang material tersebut, niscaya akan memberikan perspektif bagi pemahaman studi komprehensif dari rrelasi struktur dan subjek di masyarakat perkebunan desa Kendeng Lembu (Bourdieu 1990b: 30-51).

II. Kendeng Lembu: Ingatan tentang Belanda

II.1. Imaji tentang Belanda.

Pagi itu, saya mesti mencari transportasi ojek untuk mencapai daerah perkebunan Kendeng Lembu. Sebuah area perkebunan karet, kopi dan coklat terbesar di bawah wilayah PTPN XII, Jawa Timur. Daerah tersebut masuk sekitar delapan kilometer dari jalan raya Jember-Banyuwangi. Glenmore adalah titik transit yang menghubungkan area perkebunan dengan dunia luar (kebun). Tak hanya itu, Glenmore pun telah mengubah wilayah kebun menjadi wilayah terbuka, baik ekonomi, sosial, kultural maupun politik.

Meski ada sarana "taksi", sejenis colt station yang merupakan penghubung aktivitas sosial-ekonomi antara masyarakat kebun dan masyarakat luar, saya memilih ojek. Pertimbangannya sederhana, saya sengaja ingin berkeliling kebun untuk sedikit menjelajah komunitas-komunitas masyarakat kebun. Tak sulit menemukan tukang ojek. Segera, saya pun didekati oleh beberapa tukang ojek. *Cak Lea*, adalah tukang ojek yang berdiri di dekat saya. Setelah berunding tentang harga dan mencapai kesepakatan, *Cak Lea* pun bersedia mengantar berkeliling kebun seperti yang saya inginkan. Jarak tempuh sepanjang kira-kira sepuluh kilometer mesti dibayar setinggi Rp. 7.000,00.

Di tengah perjalanan, ia nyerocos tentang kesukaannya: sepak bola. Segera, ia memberi tahu bahwa penjaga gawang tim nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia-PSSI-Hendro Kartiko berasal dari dusun Trebla Sala, sebuah area perkebunan yang berjarak 18 kilometer dari Glenmore. Perbincangan pun merembet pada seputar sepakbola. *Cak Lea*, yang beristri orang perkebunan ini, segera bercerita bahwa ia

adalah penggemar berat tim sepakbola Barcelona. Alasannya, ia menyukai Frank Rijkaard sang pelatih, yang warga negara Belanda dan keturunan Suriname. Bagi Cak Lea, Rijkaard tak hanya memiliki darah Suriname, namun juga memiliki darah Jawa-Indonesia. Maka, tak berlebihan pula jika ia pun pendukung berat kesebelasan nasional Belanda. Meski tim Belanda tak pernah menang di ajang piala Eropa atau Dunia, Cak Lea tetaplah pendukung setia kesebelasan Belanda. Baginya, kesebelasan Belanda senantiasa mengingatkan akan sejarah terbangunnya desa di mana ia lahir dan tinggal. Belanda telah membawa imaji akan keterkaitan masa lalu, dan bagaimana Cak Lea berusaha untuk menjaga keterkaitan itu dengan sepak bola.

Sampai di kompleks pabrik pengolahan karet dan kopi, tertera papan besar dari keramik yang nampaknya baru: UUS (Unit Usaha Strategis) Kendeng Lembu. Di belakang dinding tulisan tersebut, berdiri kokoh beberapa bangunan pabrik pengolahan karet dan kopi. Pada dinding salah satu bangunan tertera tahun pendirian bangunan, 1928. Di dalam kompleks pabrik, terdapat pula bangunan besar tempat tinggal yang menghadap lembah sungai. Pepohonan rindang senantiasa meneduhi bangunan tua tersebut.

Penjaga keamanan pabrik adalah orang kedua yang saya temui. Ia mengaku dilahirkan dan besar di daerah perkebunan. Ia yang berusia sekitar 50-an tahun mengaku telah tenang hidupnya, sebab kini telah menjadi pegawai negeri di perkebunan PTPN XII. Meskipun pegawai rendahan, ia merasa sudah cukup aman hidupnya sebab biaya kesehatan, tunjangan beras, dan gaji bulanan telah tersedia sehingga tak perlu lagi mencari uang tambahan. Bahkan rumah pun, meski dimiliki oleh perkebunan, telah tersedia sehingga ia dan keluarganya tak perlu lagi membangun rumah baru.

Pak Wagiman, demikian nama penjaga keamanan itu, lahir dan tumbuh di area perkebunan. Meskipun demikian, ia tak mengetahui tentang sejarah perkebunan. Ia hanya mampu menceritakan bahwa orang tuanya dahulu juga pekerja kebun di jaman Belanda. Meskipun ia mengaku bahwa ia hanya tahu sekelumit tentang sejarah perkebunan Kendeng Lembu di jaman Belanda, namun ia membandingkan bahwa dulu tunjangan untuk keluarga pekerja kebun lebih terjamin. Saudara-saudaranya pun kini juga pekerja kebun. Ia dan saudaranya menganggap bahwa bekerja di kebun adalah nasib, di mana seluruh keluarga besarnya telah bergantung dan dihidupi oleh perkebunan.

Tatkala saya tanyakan siapa yang kini menempati rumah besar di samping pabrik, Pak Wagiman menjawab bahwa yang menempati adalah manajer pabrik perkebunan Kendeng Lembu. Hanya, bedanya jika dahulu para *administrateur* atau ADM tinggal dalam area kebun, kini manajer kebun akan pulang ke Jember jika hari libur atau akhir pekan. Keluarga manajer biasanya memang tinggal di luar area perkebunan, di kota-kota terdekat.

Tiba-tiba juru tulis *Afdeeling* Kendeng Lembu datang. Pak Shaleh, demikian namanya, ikut dalam pembicaraan kami. Setelah basa-basi sejenak, dengan diperantarai Pak penjaga keamanan, Pak Shaleh langsung ikut nimbrung. Ia pun mengatakan bahwa pada masa lampau, pada jaman Belanda, para ADM, wakilnya, dan staf-staf kantor senantiasa tinggal di area perkebunan dengan para keluarganya. Maka, tak heran jika di kawasan perkebunan Kendeng Lembu terdapat dua kompleks pemakaman Belanda. Pak Shaleh, yang biasa juga melayani jika ada turis datang, memiliki banyak pengalaman dalam relasinya dengan orang Belanda. Ia pernah membantu seorang ibu tua warga Belanda yang mencari tempat-tempat

bermain di waktu ia kecil. Pada waktu lain, ia pun pernah disuruh mengantar seorang warga Belanda yang mencari makam ayahnya.

Sehabis ngobrol dengan juru tulis atau asisten sinder dan penjaga keamanan, saya melanjutkan berkeliling kebun. Saat terik matahari menyengat, saya pun punya alasan untuk numpang berteduh pada satu rumah sederhana: campuran rumah semen dan dinding bambu. Kebetulan saya menemukan generasi muda, yang mengaku sebagai generasi ketiga. Ia kini telah bekerja sebagai guru bantu Sekolah Dasar di areal perkebunan. Ia menuturkan bahwa ia tidak mau merantau seperti halnya kakaknya yang bekerja di Malaysia, namun ia merasa sudah sangat senang bisa bekerja sebagai guru di area perkebunan. Pilihannya ini, kiranya, tak hanya karena pekerjaan sebagai guru desa lebih dekat dengan tempat tinggal, tapi dengan menjadi guru di perkebunan tersebut ia dan keluarganya tetap berhak atas tempat tinggal di perumahan perkebunan. Selain itu, ia pun bisa merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ia, lebih jauh, menuturkan bahwa sejarah perkebunan sejak jaman Belanda tidak lagi mengetahuinya. Baginya, warisan Belanda adalah struktur bangunan dan areal perkebunan yang kini ditempati. Pola relasi dan kerja adalah peristiwa keseharian yang telah dihadapi sejak lahir, dan itu telah menjadi bagian dari hidupnya.

Demikianlah, perkebunan Kendeng Lembu senantiasa hidup dalam rentangan ingatan sejarah masa lampau dan situasi kekinian. Sejarah masa lampau yang berupa masa-masa jaman Belanda senantiasa membentuk orientasi sejarah dan asal-usul terbentuknya sebuah dusun atau area perkebunan.



Foto 1. Jembatan Pintu Gerbang Komplek Perkebunan.



Foto 2. Perkebunan Kendeng Lembu.

II.2. Masa Lalu dan Orientasi Masa Depan.

Rentang sejarah tersebut menunjukkan bahwa organisasi sosial dan struktur sosial perkebunan Kendeng Lembu adalah sebuah konstruksi yang dimulai, ditanamkan dan dibentuk sejak jaman kolonial Belanda. Berawal dari keputusan politik untuk menanggulangi krisis ekonomi dan kegagalan politik tanam paksa, maka dimulailah era swastanisasi berupa penyewaan lahan-lahan produktif kepada swasta di tahun 1870an (Kartodirdjo dan Suryo: 1991). Maka, membanjirlah pengusaha-pengusaha Eropa ke Jawa untuk menanamkan investasi di bidang perkebunan. Wilayah Banyuwangi pun menjadi daerah sasaran usaha perkebunan sebab iklim dianggap cocok untuk usaha tersebut. Bermunculanlah usaha-usaha perkebunan di wilayah Banyuwangi.

Perkebunan Kendeng Lembu pun tak lepas dari dinamika makro keputusan politik ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Meneer van der Valk disebut sebagai pemilik pertama dan perintis usaha perkebunan Kendeng Lembu.

Kini, sebagian besar orang yang bekerja dan tinggal di area perkebunan Kendeng Lembu sudah tak mengenal siapa pendiri perkebunan dan bagaimana riwayat perkebunan tersebut. Bahkan, karyawan tingkat tinggi dalam struktur organisasi perkebunan pun sudah tak mengetahui secara jelas sejarah perkebunan tersebut. Hanya, ketidak-tahuan tersebut tak berarti bahwa ingatan masa lalu menjadi terhapus. Justru masa lalu selalu hadir kembali dalam dunia keseharian, berupa harapan, perbandingan dan orientasi tindakan sosial-kultural. Maurice Halbwach (1982) menjelaskan bahwa masa lalu senantiasa memberikan orientasi tindakan bagi masa kekinian. Maka, sejarah perkebunan Kendeng Lembu pun tak bisa dilepaskan dari sejarah masa lampau yang telah membangun sistem dan

struktur sosial. Pasca kolonialisme, demikian masa kini disebut, memang telah mengubah organisasi sosial perkebunan.

III. Organisasi Sosial Masyarakat Perkebunan.

III.1. Sejarah Masyarakat Perkebunan.

Sejarah perkebunan di Indonesia, seperti halnya di negara-negara bekas jajahan di Amerika Latin, Afrika dan Asia, tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi (Wolf 1982). Sistem perkebunan tersebut adalah perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian komersial (*commercial agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan tersebut adalah sistem perkebunan Eropa (*european plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang (Kartodirdjo&Surjo 1991: 3-4).

Sebelum mengenal sistem perkebunan dari Barat, masyarakat agraris di negara-negara berkembang mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Dalam struktur ekonomi pertanian tradisional, usaha kebun sering merupakan usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan kehidupan pertanian pokok.

Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih menunjukkan ekonomi subsisten. Ciri-ciri tersebut sering disebut sebagai ekonomi masyarakat agraris yang subsisten dan pra-kapitalistik.

Berbeda dengan sistem kebun, sistem perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem perkebunan merupakan usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapih, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia.

Sistem perkebunan baru tersebut, tentu, berkait dengan politik ekonomi kolonial. Dengan demikian, perkembangan perkebunan di Indonesia senantiasa terkait dengan konteks kebijakan makro ekonomi kolonial. Bahkan, pasar internasional pun turut menentukan perkembangan perkebunan.

Kebijakan politik ekonomi kolonial Belanda yang mengatur atau menentukan dunia perkebunan bisa dijejak sejak tahun 1600an dan intensif tahun 1800an. Bermula dari keinginan VOC menangguk keuntungan, sistem perkebunan mulai dikenalkan di Indonesia. Bahkan, untuk menjamin keberlangsungan sistem perkebunan dan proyek profit sebuah kebijakan tanam paksa (*cultuur stelsel*) diciptakan. Sampai masa itu, dunia perkebunan belum lah berjalan intensif. Koreksi atas kegagalan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial menggulirkan kebijakan baru, yang sering dikenal sebagai era

liberalisasi di tahun 1870. Sejak era itulah perkebunan-perkebunan swasta mulai marak.

Di Jawa, hampir di setiap wilayah memiliki area perkebunan. Area-area itu menempati wilayah-wilayah pegunungan yang tak berpenghuni. Sehingga, pola perkebunan yang berkembang adalah wilayah yang relatif terisolir dari desa-desa sekitar. Pola ini, akhirnya, membentuk komunitas baru, yang akhirnya juga membangun desa-desa perkebunan.

III.2. Banyuwangi dan Kendeng Lembu

Jawa Timur, mengikuti Dick dkk (1993), selama beberapa dekade menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah yang menakjubkan. Dari semua provinsi di Indonesia, Jawa Timur tampaknya paling mendekati bentuk ideal pembangunan berimbang (*balanced development*). Keberhasilan tersebut, niscaya disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang telah terbangun lama sejak era kolonial. Perkebunan dan pabrik gula kiranya adalah faktor pemicu untuk pembangunan infrastruktur.

Melihat kenyataan tersebut, perkebunan di Jawa Timur telah lama sebagai sektor penting bagi perkembangan ekonomi wilayah. Pola sistem perkebunan di Jawa Timur pun bisa dibagi menjadi dua: perkebunan dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah seperti Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Kediri, sedangkan daerah Banyuwangi dan Lumajang adalah wilayah perkebunan. Jikalau di dataran rendah tanaman perkebunan didominasi oleh tebu, maka di daerah dataran tinggi tanaman perkebunan adalah teh, kopi dan karet (Mackie 1993). Demikianlah, wilayah Banyuwangi sampai kini memiliki sistem pertanian perkebunan dengan didominasi tanaman kopi, karet dan coklat (Mackie 1993: 262-263).

Tabel 1.
Jawa Timur: Tanaman Perkebunan menurut Areal
dan Produksi, 1923-1986.

	1923		1970		1986	
	Areal (000 ha)	Produksi (000 ha)	Areal (000 ha)	Produksi (000 ha)	Areal (000 ha)	Produksi (000 ha)
Tebu	112	864	-	459	154	134
Kopi	74	29	-	15	38	24
Coklat	0,4	8,5	-	-	16,5	8
The	3	?	-	2	3,5	5
Karet	75	15	-	19	28,8	24

Sumber: BPS (1989) & Lanbouwatlas (1926), dalam Mackie 1993: 267.

Perkebunan yang berskala besar di Jawa Timur didirikan menjelang abad kedua puluh, terutama di lereng-lereng deretan pegunungan selatan yang memanjang ke arah timur dari Madiun sampai Malang dan Lumajang. Wilayah ini dikenal sebagai *Oosthoek* (pojok timur), dengan keresidenan Pasuruan, Malang dan Besuki menjadi areal perkebunan utama. George Birnie adalah tokoh di Karesidenan Besuki. Sekitar tahun 1860 ia merintis usaha perkebunan tembakau, dan memproduksi dau tembakau bermutu tinggi untuk pasaran cerutu di Eropa (Mackie 1993: 280).

Sejalan dengan perluasan areal perkebunan, maka di wilayah pegunungan Banyuwangi pun berkembang perkebunan kopi dan karet. Salah satunya adalah wilayah Kendeng Lembu. Daerah ini didirikan sekitar tahun 1914 oleh van der Falk, dan telah berkembang menjadi areal pabrik pengolahan kopi dan karet sekitar tahun 1928.

Kendeng Lembu adalah nama sebuah desa yang terletak di pegunungan selatan Banyuwangi. Meski secara administratif Kendeng Lembu berada di bawah sistem pemerintahan Desa Karangharjo, namun perkebunan Kendeng Lembu jauh lebih

luas maknanya sebagai desa perkebunan. Hal ini disebabkan oleh sistem perkebunan yang dibagi-bagi menjadi bagian atau afdeling. Sampai kini, wilayah perkebunan Kendeng Lembu terbagi menjadi 9 afdeling, di mana tiap afdeling memiliki spesifikasi tanaman. Pola-pola struktur organisasi kebun di Kendeng Lembu merupakan warisan organisasi perkebunan jaman Belanda.



Foto 3. Pabrik Pengolahan Karet dan Kopi Warisan Belanda.

III.3. Organisasi Sosial dan Bisnis Kendeng Lembu.

Masyarakat Kendeng Lembu hampir senantiasa berfikir dalam kerangka hirarkis menurut organisasi sosial. Dalam tataran yang lebih umum, organisasi sosial di Kendeng Lembu tidaklah berbeda dengan organisasi bisnis dari usaha perkebunan. Hirarki yang terbangun ini tidak hanya mewujudkan dalam sistem birokrasi, namun juga tereksresi secara konkret dalam ruang-ruang yang

bersifat hirarkis dalam bentuk relasi "Besaran" dan "Afdeling". Besaran adalah Kendeng Lembu, dan afdeling Kaliputih, Gentengan, Kampunganyar, Semampir, Pagergunung, Kampung Baru dan Rejosari.

Masyarakat membangun imaji bahwa wilayah besaran adalah sebuah pusat, sebuah "ibukota" di mana segala informasi dan kekuasaan bersumber. *"Jikalau dipakai perumpamaan, wilayah Besaran Kendeng Lembu ini adalah ibukota, sedang afdeling-afdeling lebih merupakan provinsi-provinsi,"* demikian ungkap juru tulis Besaran Shaleh. Pernyataannya pun dikuatkan oleh Pak Wagiman, seorang petugas keamanan pabrik. Ia menganggap bahwa pekerjaannya terletak di pusat birokrasi, sedang tempat tinggalnya di daerah afdeling adalah cabang atau daerah pinggiran.

Besaran sebagai pusat akan ditandai oleh wilayah perkantoran, rumah Besaran dan pabrik. Tiga hal inilah yang mendukung sistem kekuasaan hirarkis dari organisasi sosial masyarakat perkebunan. Sistem administrasi yang berada dalam kompleks pabrik semakin mengukuhkan kekuasaan. Pabrik dan sistem administrasinya adalah simbol sekaligus sistem administrasi yang mengkonstruksi organisasi sosial masyarakat perkebunan. Kedua hal itu tersimpulkan dalam figur seorang *"administrateur"*, yang biasa disebut sebagai orang besar. Dari sebutan orang besar ini pulalah, daerah pusat disebut besaran.

Arsitektur dan ukuran rumah di kompleks masyarakat perkebunan tersebut telah berbicara atau menyimbolkan hirarki kekuasaan dalam organisasi sosial. Secara arsitektural dapat digambarkan sebagai berikut. Persis di jantung desa Kendeng Lembu ini dapat ditemukan rumah besar sebagai simbol dan kompleks ruang kantor, di mana sistem administrasi menjalankan fungsinya mengatur dan mengontrol jalannya sistem dan struktur sosial masyarakat Kendeng Lembu.

Lapis kedua, di mana perumahan tidak terlalu besar namun dibangun lebih baik adalah tempat tinggal staf perkebunan. Biasanya, pemukiman para staf ini terletak memanjang atau mengelilingi rumah Besaran.

Lapis ketiga adalah pemukiman bagi buruh pabrik dan buruh kebun yang umum terletak di belakang rumah para staf pabrik. Kondisi bangunan para buruh ini juga berbeda dengan para staf administrasi kantor. Bangunan lebih sederhana dan berbahan bambu, *gedhek*.

Secara konkret, hirarki organisasi sosial dan bisnis di masyarakat Kendeng Lembu adalah, pucuk pimpinan dan pemegang kuasa adalah administrateur. Kemudian berturut-turut hirarki tersebut akan ditempati oleh asisten administrateur, karyawan, mandor, sinder, asisten sinder, buruh pabrik dan kebun, dan terakhir buruh lepas.

III.4. Masyarakat Kebun, Masyarakat Post-kolonial.

Tahun 1945 adalah titik awal dari perubahan sosial, politik dan ekonomi. Tahun kemerdekaan tersebut membawa implikasi pada pengaturan sistem pertanian dan perkebunan. Industri-industri perkebunan pun semakin terkena imbasnya, tatkala pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2/ 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi. Maka, dimulailah nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik asing, khususnya perkebunan Belanda, secara masif.

Politik nasionalisasi tersebut mempengaruhi sistem perkebunan, dari perusahaan asing menjadi perusahaan negara. Maka, perusahaan perkebunan besar pun menjadi perusahaan negara yang tergabung dalam Perusahaan Negara Perkebunan

(PNP)¹. Fungsi perkebunan pun didefinisikan dalam empat hal: 1) sebagai sumber devisa; 2) sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat disekitar kebun dan kaum buruhnya; 3) penggunaan tanah yang lebih efisien; dan 4) sebagai pencegah erosi banjir (Dept. Pertanian 1965: 245).

Politik perkebunan kiranya senantiasa hadir sebagai upaya dekolonisasi, sebagai upaya untuk mengeliminir dunia kehidupan perkebunan di masa kolonial. Kembali pada tahun 1976, pemerintah menggulirkan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun), yang merupakan implementasi konsep *Nucleus Estate and Smallholder* untuk pengembangan perkebunan rakyat (Gunawan 1995:2).

Pertanyaan mendasar dan mungkin klasik diajukan adalah, perubahan apa yang dihasilkan dari upaya dekolonisasi di wilayah perkebunan tersebut? Kita pun melihat bahwa dunia perkebunan menjadi terbuka dan tidak lagi merupakan *enclave*.

Masyarakat perkebunan Kendeng Lembu pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan-perubahan sosial di tingkat nasional maupun regional. Berbeda dengan perkebunan di wilayah Jawa Barat, Sumatera atau Kalimantan yang banyak berubah akibat kebijakan perkebunan inti rakyat, sistem perkebunan Kendeng Lembu mengalami perubahan akibat pergeseran sistem administratif pemerintahan desa. Masyarakat perkebunan Kendeng Lembu bukan lagi sebagai masyarakat otonom, namun berada di bawah otoritas pemerintahan desa Karangharjo. Pergeseran ini membawa implikasi bahwa masyarakat perkebunan menjadi desa perkebunan yang memiliki dua sistem, yaitu sistem desa dan sistem kebun. Dalam

¹ Kelak, nama perusahaan negara perkebunan berganti lagi menjadi perseroan terbatas perkebunan negara (PTPN).

ungkapan seorang staf pemerintahan desa, masyarakat Kendeng Lembu memiliki dua pimpinan, satu pimpinan dalam organisasi perusahaan perkebunan dan satu pimpinan desa.

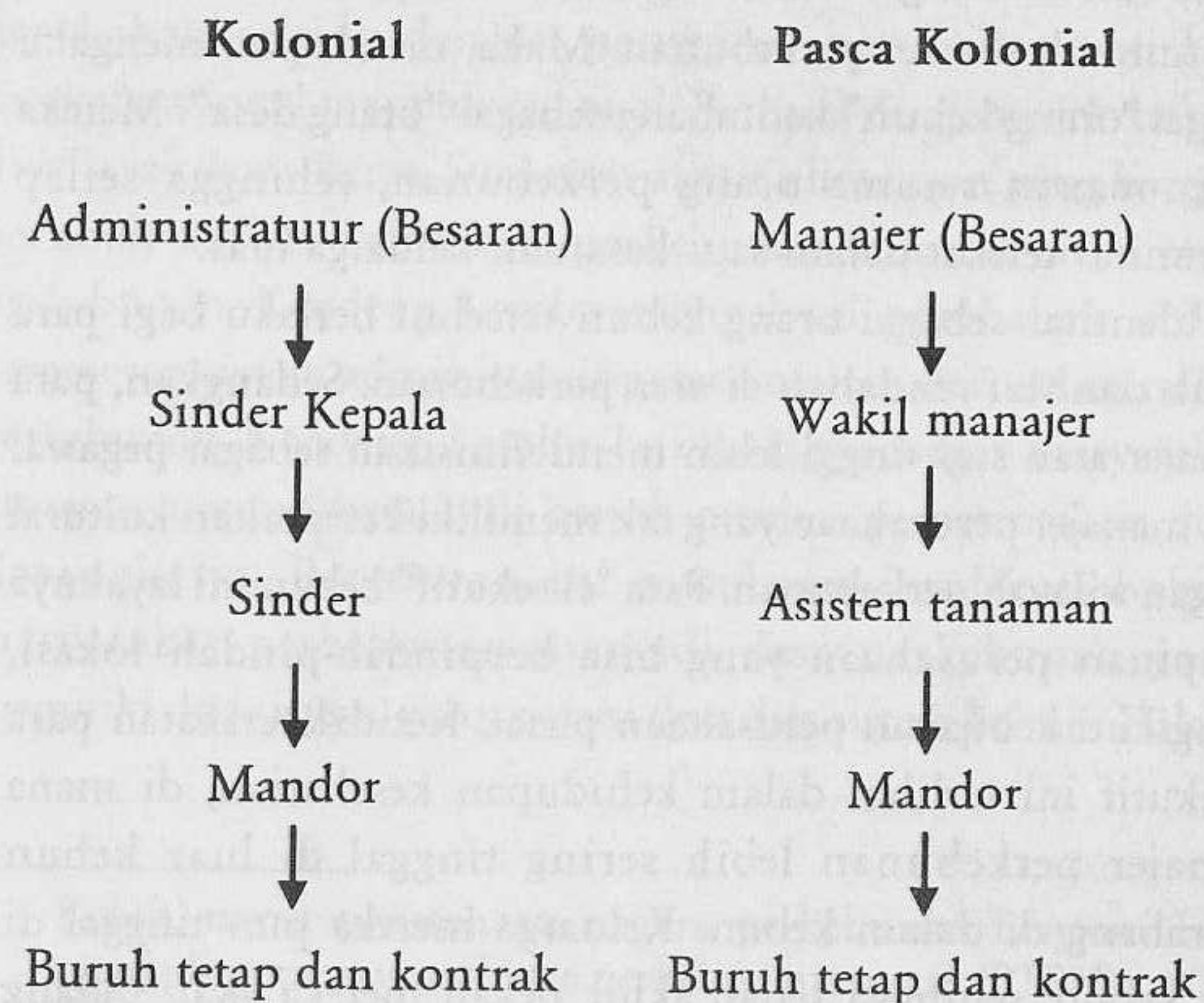
Mana yang lebih dominan, desa atau kebun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melihat bagaimana dunia kehidupan sehari-hari masyarakat Kendeng Lembu. Bagaimana mereka mendefinisikan identitasnya, bagaimana relasi-relasi sosial berjalan, serta bagaimana sistem dan struktur sosial terkonstruksi. Pokok-pokok soal itulah yang menuntun untuk memahami masyarakat perkebunan pasca-kolonial.

Negara bisa mengatur sistem perkebunan, tapi masyarakat kebun telah memiliki sistem dan struktur sosial mapan yang tak goncang oleh perubahan. Mungkin, pernyataan tersebut tepat untuk menggambarkan sistem dan struktur masyarakat perkebunan Kendeng Lembu saat ini. Sampai kini, masyarakat membangun identitasnya sebagai masyarakat kebun. Rata-rata penduduk adalah generasi ketiga dan keempat, dan telah lahir dan tumbuh di area perkebunan. Maka, merekapun mengaku sebagai "orang kebun" ketimbang sebagai "orang desa". Mereka kawin-mawin sesama orang perkebunan, sehingga setiap komunitas terikat dalam satu kesatuan keluarga luas.

Identitas sebagai orang kebun tersebut berlaku bagi para buruh dan staf rendahan di area perkebunan. Sedangkan, para manajer atau staf tinggi lebih mendefinisikan sebagai pegawai atau manajer perusahaan yang tak memiliki keterkaitan kultural dengan wilayah perkebunan. Para "eksekutif" kebun ini layaknya pimpinan perusahaan yang bisa berpindah-pindah lokasi, mengikuti kebijakan perusahaan pusat. Ketidak-terikatan para eksekutif ini terlihat dalam kehidupan keseharian, di mana manajer perkebunan lebih sering tinggal di luar kebun ketimbang di dalam kebun. Keluarga mereka pun tinggal di luar kebun, sehingga setiap akhir pekan mereka akan pulang

ke kota. Para eksekutif ini lebih banyak mengurus produksi dan keuntungan hasil kebun, ketimbang mengelola perkebunan secara keseluruhan yang menyangkut masyarakat dan budayanya.

Meski terdapat dua konstruksi identitas dari para buruh dan manajer, organisasi sosial masyarakat Kendeng Lembu masihlah mewarisi organisasi perkebunan kolonial. Organisasi sosial-bisnis ini dapat dilihat masih sama dengan hirarki sistem kolonial, di mana manajer setara dengan administratuur. Di bawah administratuur adalah wakil manajer (sinder kepala), yang kemudian diikuti para sinder (asisten tanaman), dan di bawahnya adalah para mandor. Sedangkan pada posisi terbawah ditempati para buruh, baik tetap maupun kontrakan. Buruh kontrakan memiliki hak paling lemah, terlebih dibandingkan dengan buruh tetap.



III.5. Kuasa dan Kontrol.

Implikasi tetap langgengnya struktur organisasi sosial masyarakat adalah tetap abadinya relasi kuasa antara "bawahan" dan "atasan". Di sinilah kita melihat bagaimana sistem sosial berjalan. Masyarakat Kendeng Lembu, yang tersusun secara hirarkis, menunjukkan relasi sosial yang hirarkis pula. Dalam susunan hirarkis tersebut terselip relasi kekuasaan, yang secara konkret dapat ditemui dalam kontrol akses ekonomi, sosial dan politik.

Akses ekonomi sampai kini tetaplah dikuasai dan ditentukan oleh manajer perusahaan perkebunan. Manajer tetaplah berfungsi seperti *administratuur* jaman Belanda. Sistem pengangkatan pegawai, sistem penggajian dan juga sistem kesejahteraan di masyarakat perkebunan ditentukan oleh manajer, dan berjalan secara hirarkis.

Sistem sosial pun juga berjalan dalam relasi hirarkis, di mana manajer menentukan konsepsi tentang dunia sosial masyarakat perkebunan, seperti perijinan pentas seni, acara keagamaan. Dalam kaitan ini, solidaritas sosial di masyarakat perkebunan tak hanya ditentukan oleh sistem birokrasi hirarkis organisasi bisnis perkebunan, namun dipengaruhi pula oleh adanya faktor agama dan kehadiran seorang tokoh agama. Agama di sini lebih berperan secara sosial ketimbang acara ritual atau spiritual. Gambaran keseharian masyarakat menunjukkan bahwa terkadang kehadiran sang tokoh agama lebih penting ketimbang agama itu sendiri.

Di area politik, masyarakat perkebunan lebih menunjukkan relasi patron klien. Hal ini semakin mengemuka tatkala terjadi pemilihan partai politik. Pilihan-pilihan warga senantiasa ditentukan oleh para manajer.

Hal yang menarik, konsep relasi kekuasaan ini semakin lama menjelma dari bentuk kehadiran sang penguasa manajer menjadi kuasa sistemik yang berpusat pada "Besaran". Besaran menjadi kontrol panoptik atas segala tingkah laku warga perkebunan. Bukan lagi sosok manajer yang memiliki kuasa penuh, namun sistem "Besaran" dengan kuasa dan kontrolnya yang telah mengkonstruksi sistem kekuasaan masyarakat perkebunan.

Pengalaman pribadi kiranya menjadi contoh menarik. Setelah seharian berkeliling melakukan wawancara dan pengamatan, saya berniat menginap di salah satu kediaman warga. Setelah malam tiba, datanglah problem. Saya mesti melaporkan kehadiran saya kepada ketua rukun tetangga. Ketua rukun tetangga ini sehari-hari bekerja sebagai buruh kontrak. Secara hirarki ia berada di bawah dalam sistem perkebunan, tapi menempati posisi lumayan tinggi dalam sistem pemerintahan desa. Sedangkan orang yang ingin saya inapi adalah juru tulis atau asisten sinder, yang secara hirarkis memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat perkebunan. Anehnya, dua-duanya merasa takut memberikan ijin saya menginap, hanya gara-gara saya tidak membawa surat pengantar bepergian. Keduanya, baik petugas RT dan asisten sinder merasa terkontrol oleh sistem Besaran, sehingga memilih jalan aman untuk menolak. Keduanya merasa takut, bahwa jika mereka memberikan ijin akan ditegur oleh manajer dan pangkatnya atau pekerjaannya akan dicopot. Pada titik inilah, kita melihat bahwa sistem kontrol dalam relasi kekuasaan berjalan anonim. Besaran tak hanya menjadi pusat, tetapi menjadi kontrol panoptik atas segala tingkah laku warga perkebunan.



Foto 4. Rumah Besar.

IV. Budaya dan Ekonomi Kebun.

Apa yang dimaksud dengan budaya di sini adalah lebih merujuk pada pola-pola orientasi kultural yang memberikan tuntunan pada tingkah laku masyarakat. Maka di sini, budaya juga hidup dalam pola jaringan dalam struktur sosial. Selain itu, masyarakat perkebunan pun mendefinisikan identitasnya sebagai masyarakat kebun, yang bermakna bahwa mereka hidup dalam sebuah sistem sosial yang beda dengan desa-desa pada umumnya. Apa yang membedakannya? Di sini mode produksi adalah pembangun identitas.

Masyarakat kebun adalah mereka yang biasa bekerja sebagai buruh, tetap maupun tak tetap yang telah lama tinggal di area perkebunan. Bahkan sangat mungkin mereka lahir dan tumbuh di perkebunan. Umum terjadi bahwa mereka yang mengaku sebagai masyarakat kebun saat ini merupakan generasi kedua atau ketiga.

Sedang lapis sosial masyarakat atas, seperti para wakil manajer, manajer dan staf administrasi cenderung untuk tak mengidentifikasi sebagai masyarakat kebun. Mereka condong pada sikap bahwa mereka bekerja di kebun karena mereka bekerja di perusahaan, dan itu artinya bukan orang kebun. Contoh konkret adalah keluarga manajer yang tidak pernah berada di kebun.

Demikianlah masyarakat perkebunan adalah masyarakat yang terbelah menjadi dua, buruh dan para staf administratif. Para buruh, yang secara ruang terikat pada wilayah perkebunan, dengan gampang mereka mengidentifikasi sebagai orang kebun; sedang mereka yang tidak terikat pada ruang yang bernama area perkebunan akan lebih gampang meninggalkan kebun dan tak perlu mengidentifikasi sebagai orang kebun.

Konsekuensi dari identifikasi sebagai orang kebun, menyembulkan sikap resistensi dari kalangan buruh terhadap kalangan atas seperti para staf dan manajer. Resistensi untuk mempertahankan solidaritas kelompok berbentuk perkawinan antar tetangga, saudara dekat, atau sesama buruh di wilayah perkebunan.

IV.1. Agama dan Resistensi Sosial.

Anggapan umum bahwa desa perkebunan memiliki sistem dan struktur sosial sendiri dan berbeda dengan desa-desa lain adalah benar adanya. Bahkan keyakinan agama sering pula dianggap berbeda dengan desa-desa lain; sifat terisolasinya desa menyebabkan praksis keagamaan masyarakat perkebunan dianggap tidaklah setinggi desa-desa non-perkebunan. Setiap afdeling di perusahaan perkebunan Kendeng Lembu, kini, telah memiliki masjid sebagai pusat ibadah. Selain itu, setiap masjid

juga memiliki pimpinan agama lokal yang biasa diambil dari salah satu buruh.

Fenomena menarik adalah praktik keagamaan di Desa Kendeng Lembu, yang juga merupakan Besar. Imam masjid Desa Kendeng Lembu adalah warga perkebunan namun bukan sebagai karyawan atau buruh perkebunan. Mbah Imam, demikian ia dipanggil, adalah seorang imam masjid yang memiliki pekerjaan petani. Lahan garapannya adalah di sekitar sungai yang mengalir membelah desa perkebunan. Lahan ini, sesungguhnya adalah milik perkebunan, tetapi bantarannya sengaja diberikan kepada Mbah Imam untuk usaha pertanian vanili.

Meski Mbah Imam tak memiliki keterkaitan dengan sistem perkebunan, toh ia tetaplah orang yang menduduki posisi penting di organisasi sosial perkebunan Kendeng Lembu. Mbah



Foto 5. Masjid Desa Kebun Kendeng Lembu.

Imam menjadi sosok mediator antara buruh dengan buruh atau buruh dengan staf atau manajer. Otoritas pengetahuan di bidang keagamaan menjadikannya figur independen yang bisa mendamaikan jika terjadi konflik, atau bisa mengurai persoalan jika sedang terjadi konflik-konflik sosial. Maka tak mengherankan bahwa para manajer pun setiap tahun perlu membuat kunjungan silahturahmi kepada Mbah Imam. Sedang, para buruh pun setiap tahun atau jika perlu juga membuat silahturahmi.

Meskipun di tengah desa ada masjid, toh masyarakat Kendeng Lembu tidak terlalu antusias dalam menjalankan praktik-praktik keagamaan. Masjid biasa dipenuhi oleh anak-anak dalam dunia kehidupan keseharian. Di sini kita melihat bahwa fungsi agama lebih pada dimensi sosial, yaitu perekat atau pembangun solidaritas sosial. Bahkan, dalam level tertentu posisi Mbah Imam akan lebih penting ketimbang agama itu sendiri. Masyarakat akan menghargai sosok Mbah Imam sebagai pendamai dan pengayom masyarakat, ketimbang melihatnya sebagai tokoh agama. Akibat dari praktik agama seperti itu, maka masjid dan agama tidaklah menjadi sentral aktivitas warga perkebunan.

Walaupun agama tidaklah menduduki peran sentral dalam dunia kehidupan masyarakat, namun yang menarik adalah bahwa agama seringkali juga digunakan sebagai resistensi terhadap dominasi sistem perkebunan. Agama menjadi oase yang menawarkan alternatif lain jikalau terjadi ledakan konflik-konflik. Bahkan agama dengan Mbah Imam menjelma menjadi payung bagi para buruh jikalau berhadapan dengan para manajer dan juga orang luar.

IV.2. Resistensi Ekonomi.

Upah buruh dan ketergantungan hidup dengan pabrik atau sistem perkebunan menciptakan strategi-strategi bertahan hidup para buruh perkebunan. Para buruh yang tinggal di wilayah perkebunan tentu saja tidak memiliki areal sawah atau ladang untuk aktivitas ekonomi pertanian mereka. Para buruh tersebut murni mengandalkan pendapatannya dari upah.

Apakah upah mereka mencukupi? Disinilah terletak hal-hal yang menarik. Untuk kebutuhan dasar seperti keperluan air, listrik dan juga kesehatan bagi buruh tetap, hal itu sudah tercukupi. Namun keterbukaan desa, yang mendorong tingkat konsumsi berubah dan cenderung naik, merupakan faktor determinan bagi tingkah laku ekonomi. Di sinilah para buruh mengalami dua dominasi, dominasi dari sistem produksi yang berada sistem produksi perkebunan dan dominasi sektor konsumsi akibat keterbukaan desa. Salah satu contoh dominasi sektor konsumsi adalah maraknya kebutuhan hiburan.

Berhadapan dengan dominasi di sektor produksi dan konsumsi tersebut masyarakat berusaha resisten dengan mencari alternatif-alternatif tambahan penghasilan. Di sektor pertanian dan peternakan, para buruh warga perkebunan memanfaatkan bantaran sungai untuk menanam pisang dan tanaman-tanaman lain yang laku untuk dijual. Selain itu menjadi umum bagi warga bahwa peternakan sapi adalah salah satu upaya untuk mencari alternatif tambahan penghasilan.

Salah satu alternatif yang kini populer di kalangan kaum muda atau generasi baru masyarakat perkebunan adalah merantau. Pemuda-pemudi warga perkebunan pergi merantau ke kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan bahkan Malaysia, Singapura dan Taiwan. Arus migrasi ke luar daerah ini kini menjadi tren dan cukup menjanjikan pula uang kiriman

untuk orang tua. Demikianlah, pola produksi dan konsumsi dalam masyarakat perkebunan ternyata juga masih berada dalam kuasa dan kontrol yang berpusat pada kompleks Besaran.

Studi masyarakat perkebunan, dengan mengambil kasus pada masyarakat perkebunan Kendeng Lembu, menjadi hal menarik sebab menggambarkan secara keseluruhan sebuah masyarakat yang hidup dalam masa post-kolonial. Situasi post-kolonial ini pulalah yang mengkonstruksi sistem dan struktur sosial masyarakat Kendeng Lembu.

V. Kesimpulan

Kita pun menyaksikan bahwa masyarakat perkebunan menunjukkan metamorfosis kultural, meski masyarakat telah berada dalam alam kemerdekaan atau post-kolonial. Warisan kolonial yang berupa organisasi sosial, ternyata, hanya berganti nama; sedang esensi dari organisasi sosial tersebut adalah sama. Meskipun demikian, perubahan kebijakan sebagai upaya dekolonisasi menciptakan desa-desa perkebunan menjadi semakin terbuka, dan bukan lagi sebagai enclave yang terisolasi dan lepas dari dunia luar.

Keterbukaan ini memungkinkan masuknya arus dominasi pemerintahan via pemerintah desa, dan juga dominasi ekonomi yang menonjol bidang-bidang konsumsi. Hanya, yang menarik, masyarakat perkebunan boleh mengecap keterbukaan, namun struktur yang telah menjadi mapan tampaknya sulit untuk diguncang. Sistem dan struktur sosial senantiasa menunjukkan pola hirarkis dalam relasi kuasa, di mana Besaran adalah menara tertinggi yang memancarkan kuasa dan kontrol terhadap masyarakat perkebunannya.

Kuasa dan kontrol ini terjadi dalam setiap peristiwa keseharian, pada ruang produksi dan sektor konsumsi. Kontrol semestinya menciptakan resistensi-resistensi sebagai bentuk keluar dari dominasi atau penyelamatan diri. Maka disini, kita melihat aneka resistensi yang sesungguhnya juga merupakan tindakan sosial-ekonomi. Agama dan pemimpinnya menjadi mediator untuk tawar-menawar dengan sang dominator, dan pertanian bantaran sungai menjadi alternatif dari dominasi ekonomi di sektor produksi, serta migrasi menjadi alternatif atau kadang juga keluar dari jeratan dominasi Besaran.

Akhirnya, yang menarik adalah bahwa resistensi tersebut terus menerus berada dalam proses tawar-menawar. Dan proses itu menghasilkan bahwa masyarakat perkebunan tetaplah berada dalam kuasa dan kontrol sistem Besaran. Besaran tak lagi merupakan sosok sang pemimpin, namun telah menjelma menjadi lensa panoptik yang mengikat dan mengontrol aneka tingkah laku warganya. Inilah pokok-pokok dari riset ini.

Bibliografi

- Bachriadi, Dianto, 2001, 'Situasi Perkebunan Indonesia Kontemporer', in Tim Lopera (ed.), *Prinsip-Prinsip Reformasi Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Bourdieu, Pierre, 1990a, 'Die Biographische Illusion', in *BIOS, Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History* 3.p 75-81.
- , 1990b, *The Logic of Practice*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Brass, Tom and Henry Bernstein, 1992, 'Introduction: Proletarianisation and Deproletarianisation on the Colonial Plantation', in *The Journal of Peasant Studies*, Volume 19 Number April/July 1992.p 68-86.
- Breman, Jan and E. Valentine Daniel, 1992, 'Conclusion: The making of a Coolie', in *The Journal of Peasant Studies*, Volume 19 Number April/July 1992.p 68-86.
- Dick, Horward, 2002, "Formation of the Nation State 1930s-1966," in Howard Dick, V.J.H. Houben, J.T. Lindblad

- and Thee Kian Wie, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Leiden: Asian Studies Association of Australia in cooperation with KITLV Press. p 153-192.
- Elson, R.E., 1984, *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency 1980-1940*. Singapore, Oxford and New York: Oxford University Press.
- Fuchs-Heinritz, Werner, 2000, *Biographische Forschung*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Geertz, Clifford, *Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
- Gregory, C.A., 1989), *Observing the Economy*, London: Routledge.
- Hefner, Robert, 1990, *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History*. Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press.
- Hill, Hal, 1996, *The Indonesian Economy since 1966: Southeast Asia's Emergent Giant*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Houben, Vincent J.H., 2002, "Java in the 19th Century: Consolidation of a Territorial State," in Howard Dick, V.J.H. Houben, J.T. Lindblad and Thee Kian Wie, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Leiden: Asian Studies Association of Australia in cooperation with KITLV Press. P 56-82.
- Kartodirdjo, Sartono and Djoko Suryo, (1991), *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.

- Knight, G.R., 1993, *Colonial Production in Provincial Java: the Sugar Industry in Pekalongan-Tegal, 1800-1942*, Amsterdam, VU University Press.
- _____, 1992, 'The Java Sugar Industry as a Capitalist Plantation: A Reappraisal, in *The Journal of Peasant Studies*, Volume 19 Number April/July 1992.p 68-86.
- Lindblad, J.T., 2002, "The Late Colonial State and Economic Expansion 1900-1930s", in Howard Dick, V.J.H. Houben, J.T. Lindblad and Thee Kian Wie, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Leiden: Asian Studies Association of Australia in cooperation with KITLV Press.p 111-152.
- Mackie, J. (1993), "Plantations and Cash Crops in East Java: Changing Patterns" in Howard Dick, James J. Fox, and Jamie Mackie, *Balanced Development: East Java in the New Order*, Singapore: Oxford University Press.
- Marcus, George E. and Michael M.J. Fischer, *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago and London: the University of Chicago Press.
- Mintz, Sidney W., "The Plantation as a Socio-Cultural Type," in Vera Rubin, *Plantation Systems of the New World*. Washington: PAN America Union.p 42-49.
- Simarmata, Rikardo, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta: Insist Press.
- Stoler, Ann Laura, 1985, "Perception of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra", in *American Ethnologist* 12 (4).p 642-658.

- _____, 1986, 'Plantation Politics and Protest on Sumatra's East Coast', in *The Journal of Peasant Studies*, Volume 13 Number 2.p 124-143.
- _____, 1995, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*, Michigan: the University of Michigan Press.
- Thee Kian Wie, 1977, *Plantation Agriculture and Exports Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta LEKNAS-LIPI.
- Wohlrab-Sahr, 2002, 'Prozesstrukturen, Lebenskonstruktionen, biographische Diskurse, in *BIOS, Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History* 15.p 5-23.
- Wolf , Eric, 1959, "Specific Aspects of Plantation Systems in the New World: Community Sub-Cultures and Social Class," in Vera Rubin, *Plantation Systems of the New World*. Washington: PAN America Union.p 136-145.
- _____, 1982, *Europe and the People without History*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.